



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT TIM PELAKSANA
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA**

Hari / Tanggal : Selasa / 28 Januari 2014
Waktu : 10:00 – 14:00
Tempat : Ruang Mahakam – Gedung A.A. Maramis II Lantai 3
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Agenda : Pembahasan tentang kemajuan pelaksanaan EITI Indonesia

Peserta Rapat:

Pemerintah

1. Sekretariat Jenderal KESDM, diwakili : FF. Hendro Gunawan.
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diwakili: Irfan Sofi, Sandy Firdaus, dan Muhamad Hijrah.
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, diwakili: Yulianto dan Tobia Parulian
4. Deputi Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diwakili: Sendi Zetaturadi dan Sumbada.
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), diwakili: Beti Damayanti dan Nurmelia Y.
6. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, diwakili : Indah Realita dan Juniarti Chandra.
7. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, diwakili: Syahrial Abdi.
8. Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur: Amrullah dan P.R. Bantolo
9. Asosiasi Pertambangan Indonesia, diwakili: Mukhlilis.
10. Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia, diwakili: Supriatna Suhala.
11. Masyarakat Sipil, diwakili : Maryati Abdullah dan Wasingatu Zakiyah

Sekretariat EITI Indonesia

1. Ketua Sekretariat EITI Indonesia, Emy Perdanahari
2. PPK, Budi Utomo
3. Plh Wakil Sekretaris Tim Transparansi/Revenue *Specialist*, Ambarsari Dwi Cahyani
4. Regulatory *Specialist*, Ronald Tambunan
5. Revenue Specialist II, Anita Pascalia
6. Communication Specialist, Fajar Reksoprodjo
7. IT Specialist, Tri Wicaksono

8. Staf Sekretariat : Yuliana
9. Staf Sekretariat: Malidu Ahmad

World Bank

1. Penasihat EITI dari Bank Dunia: David W Brown

Rekonsiliator

1. Ade Ikhwan
2. Myrnie Zachraini
3. Muharman Askandar
4. Teuku Mirastra
5. Irsan Thayeb
6. Staf KAP Gideon Ikhwan Sofwan

Risalah Rapat

Rapat dibuka oleh pemimpin rapat yaitu Bambang Adi Winarso, Plh Deputi ESDM/Ketua Tim Pelaksana Transparansi.

Bambang AW menyampaikan agenda rapat hari ini adalah:

1. Revisi ruang lingkup pelaporan 2010-2011 sektor pertambangan;
2. Laporan awal pekerjaan Rekonsiliator;
3. Rencana kegiatan Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif selama 2014.

Materi pembahasan sebagaimana dalam lampiran.

Pembahasan dan keputusan mengenai pembahasan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

I. Revisi ruang lingkup pelaporan 2010-2011 sektor pertambangan

Ruang lingkup pelaporan 2010 dan 2011 sesuai dengan kesepakatan pada rapat sebelumnya akan fokus pada perusahaan yang membayar royalti di atas 25 milyar rupiah di tahun 2010 dan 2011. Dari kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 53 perusahaan pertambangan yang akan melapor untuk tahun 2010 dan 2011, dan 30 perusahaan untuk tahun 2011. Nama-nama perusahaan sebagaimana pada dokumen terlampir.

Namun demikian, merujuk materialitas sebelumnya yaitu bahwa perusahaan pelaporan adalah yang membayar royalti di atas 5 milyar rupiah di tahun 2010 dan 2011, maka perusahaan-perusahaan ini akan tetapi dimasukkan dalam laporan dan bersifat laporan unilateral, di mana tidak akan direkonsiliasi.

II. Laporan awal pekerjaan Rekonsiliator

Untuk perusahaan-perusahaan pertambangan yang masih belum memberikan laporannya, Tim Pelaksana dari instansi pemerintah terkait, asosiasi pertambangan dan LSM akan membantu menghimbau perusahaan-perusahaan tersebut agar segera melapor, diantaranya melalui press release.

Mengenai data dari Ditjen Pajak yang masih belum diberikan, akan diadakan pertemuan antara Sekretariat EITI dengan Ditjen Pajak untuk membahas persyaratan mengenai akte pendirian perusahaan dan hal-hal yang diperlukan agar Ditjen Pajak dapat memberikan laporannya. Alternatif lainnya, meminta akte perusahaan ke Kemenkumham.

III. Rencana kegiatan Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif selama 2014

Akan diadakan Rapat Tim Pengarah segera untuk membahas antara lain:

1. melaporkan hasil rekonsiliasi serta melaporkan seluruh kegiatannya;
2. meminta rapat terkait arahan yang membutuhkan pengambilan keputusan di tingkat menteri.

Hal yang perlu diputuskan dalam Rapat Tim Pengarah antara lain mengenai revisi Perpres 26/1020 sehingga dapat mengadopsi Standar EITI yang baru. Untuk itu perlu diadakan rakor tingkat eselon 1 untuk membahas substansinya terlebih dahulu.

Sekretariat EITI Indonesia terlebih dahulu akan mempersiapkan bahan-bahan terkait dengan Standar EITI yang harus diadopsi dalam revisi Perpres 26/2010. Bahan ini akan disampaikan dalam Rapat Tim Pelaksana berikutnya.

Terkait dengan penyusunan scoping note untuk pelaporan berikutnya, ToR konsultan yang akan menyusun scoping note tersebut sudah disusun oleh Bank Dunia, dan akan direview terlebih dahulu oleh Tim Pelaksana. Untuk itu ToR dimaksud akan diedarkan terlebih dahulu kepada anggota Tim Pelaksana untuk mendapatkan komentar dan masukan.

Rapat selesai.

Catatan:

Risalah rapat ini dilengkapi dengan beberapa lampiran, sebagai berikut:

1. Materi presentasi tentang revisi ruang lingkup pelaporan 2010-2011 sektor pertambangan dan rencana kegiatan Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif selama 2014
2. Materi presentasi tentang laporan awal pekerjaan Rekonsiliator
3. Daftar perusahaan sesuai dengan revisi ruang lingkup pelaporan 2010-2011 sektor pertambangan